



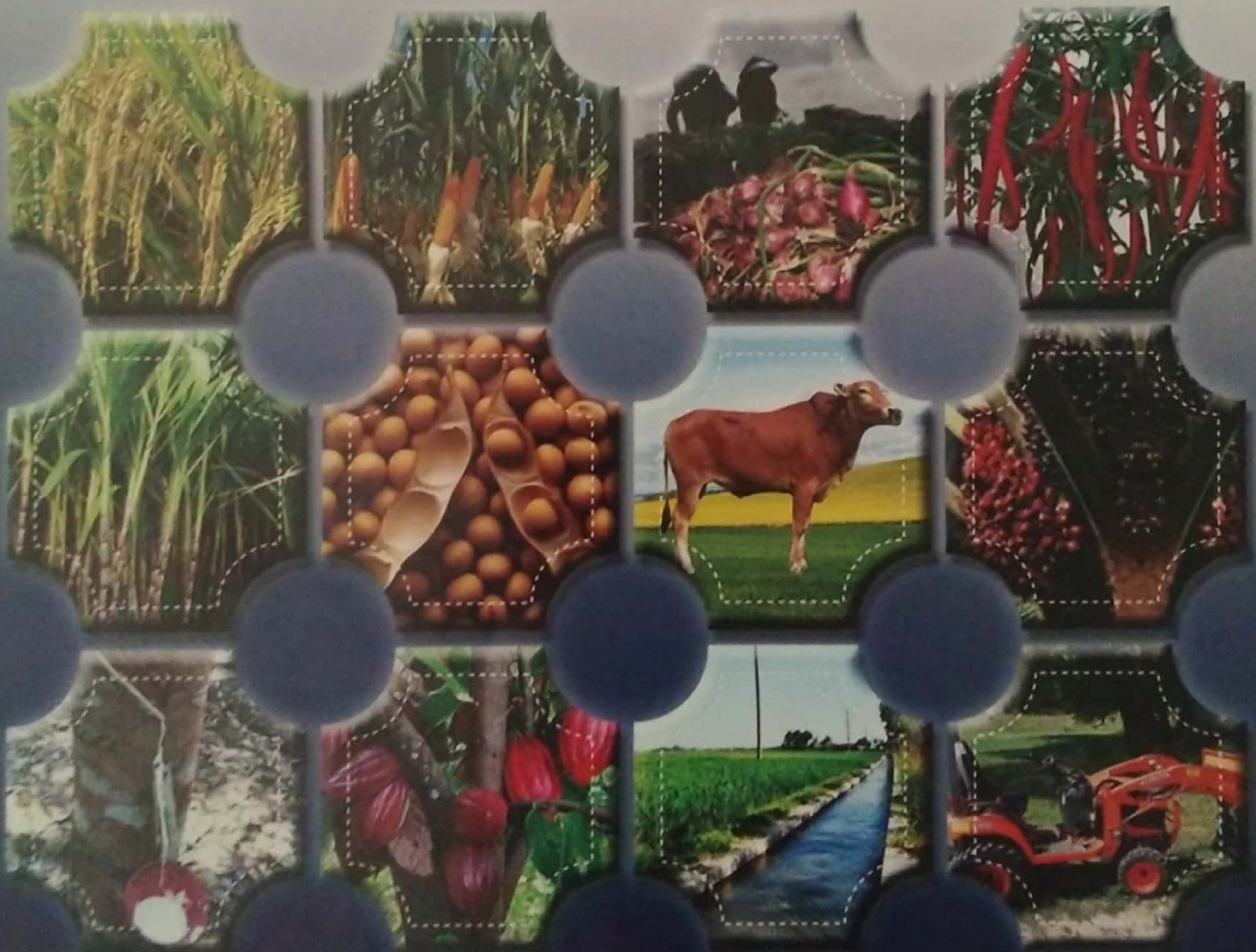
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2022

KAMIS,
EDISI ;

27 JANUARI 2022
00226537/GBP/II/2022

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM, No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email : humas-ip@pertanian.go.id, Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

KAMIS, 27 JANUARI 2022

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :

▪ Pupuk Indonesia Digitalisasi Proses Distribusi (R)	1
▪ Digitalisasi, Bikin Distribusi Pupuk Subsidi Real Time (RM)	2
▪ Beban Ganda Demi Dapat Pupuk Bersubsidi (K)	3
▪ Tak Ada Pupuk Subsidi Petani Tinggalkan Padi (K)	4
▪ Keluarga Politisi di Jalur Distribusi Pupuk Bersubsidi (K)	5
▪ Sindikat Menguasi Pupuk Bersubsidi (K)	6-7
▪ Penyalur Jual Bebas Pupuk Subsidi (K)	8-9

2. LITBANG PERTANIAN :

▪ Mentan Dorong Inovasi Pertanian Adaptif Iklim (ID)	10
--	----

3. KETAHANAN PANGAN :

▪ Harga Beras Stabil Sampai Panen Raya (ID)	11
▪ Awasi Distribusi Migor (R)	12
▪ Migor Rp 14 Ribu Belum Merata di Pasar (R)	13-14
▪ Awasi Distribusi Minyak Goreng (SI)	15-16
▪ Waspada Inflasi Tinggi Tahun Ini (K)	17-18

II. PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

ARTIKEL DAN OPINI :

▪ Reforma Subsidi Pupuk (K)	19-21
▪ Efektivitas Minyak Goreng Murah (R)	22

oooooooo O ooooooooo

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 27 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pupuk Indonesia Digitalisasi Proses Distribusi

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
MUHAMMAD NURSYAMSI

JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat proses pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah. Salah satunya dengan melakukan pengawasan distribusi pupuk dari pabrik sampai ke kios secara *real time*. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, dengan teknologi digital, perusahaan dapat melacak langsung perjalanan produk pupuk subsidi, baik yang menggunakan kapal laut maupun angkutan darat.

"Dengan sistem yang kami miliki ini, kita dapat mengetahui posisi barang setiap saat dan dapat lebih dini mengetahui bila ada potensi kekurangan pasokan di daerah tertentu," ujar Gusrizal melalui keterangan tertulis, Rabu (26/1).

Gusrizal mengatakan, sistem yang sudah beroperasi sejak 2020 ini dinamakan *distribution planning and control system* (DPCS). Melalui sistem ini, ujarnya, Pupuk Indonesia dapat mengawasi teknis penyaluran pupuk subsidi secara *real time*.

"DPCS dapat mengawasi proses distribusi dari gudang produsen hingga kios-kios resmi. Bahkan, DPCS mampu mengetahui jumlah stok saat dalam perjalanan, baik di darat maupun saat di pelabuhan," ungkap Gusrizal.

Selain data stok, lanjut Gusrizal, DPCS juga menyajikan data penjualan, alokasi pupuk subsidi di tiap daerah, kapasitas gudang, informasi distributor dan pengecer, serta kontak staf distribusi dan pe-

masaran di masing-masing wilayah. Sistem ini dapat memberikan gambaran lengkap mengenai pendistribusian pupuk subsidi ke berbagai daerah. R. G.

Gusrizal menyebut DPCS juga dilengkapi fitur peringatan dini atau *early warning system* untuk mendeteksi kondisi stok di daerah yang ditandai dengan indikator warna. Dia menjelaskan, warna hijau menggambarkan stok tersedia atau bahkan melebihi ketentuan pemerintah, warna oranye menandakan stok mendekati batas ketentuan, dan warna merah berarti stok di bawah ketentuan minimal pemerintah. "Oleh karena itu, kami senantiasa menjaga stok pupuk subsidi selalu berwarna hijau," sambung Gusrizal.

Menurut Gusrizal, sistem ini juga menjadi alat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional distribusi. Perusahaan pun dapat memperkuat prinsip enam tepat, yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat harga.

Gusrizal menyampaikan, DPCS merupakan inovasi digital mandiri buatan Pupuk Indonesia. Dia mengatakan, sistem ini sangat kompleks karena meliputi wilayah distribusi yang luas, karakter setiap wilayah yang berbeda, hingga melibatkan banyak distributor dan kios.

Kehadiran pupuk bersubsidi merupakan salah satu upaya men-

jaga daya saing pertanian Indonesia di tengah lonjakan harga pupuk nonsubsidi. Kenaikan harga bahan baku impor membuat harga pupuk nonsubsidi ikut melonjak.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan, langka Cina yang menyetop ekspor fosfat memiliki pengaruh besar terhadap situasi harga bahan baku secara internasional. Selain fosfat, harga bahan baku lainnya, seperti KCL, juga naik tinggi hingga tiga kali lipat.

Meski begitu, ia melanjutkan, harga pupuk nonsubsidi yang dijual oleh perseroan di dalam negeri masih lebih murah daripada harga internasional. Dia menjelaskan, rata-rata harga pupuk di pasar ekspor kini mencapai Rp 14,5 juta per ton, sedangkan di Indonesia hanya dijual seharga Rp 9,3 juta per ton. "Jadi, di dalam negeri, harga pupuk lebih murah sekitar Rp 5 juta dibandingkan luar negeri," kata Bakir. ■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Digitalisasi, Bikin Distribusi Pupuk Subsidi Real Time

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat proses pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan distribusi pupuk dari pabrik sampai ke kios secara *real time*.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal mengatakan, bahwa dengan teknologi digital, pihaknya dapat melacak langsung perjalanan produk pupuk subsidi baik yang menggunakan kapal laut maupun angkutan darat. "Dengan sistem yang kami miliki ini, kita dapat mengetahui posisi barang setiap saat. Dan dapat lebih dini mengetahui bila ada potensi kekurangan pasokan di daerah tertentu," tutur Gusrizal dalam rilisnya, kemarin. **(M.17)**

Sistem yang sudah dioperasikan sejak 2020 ini dinamai *Distribution Planning & Control System* (DPCS). Melalui sistem ini, Pupuk Indonesia dapat mengawasi teknis penyaluran pupuk subsidi secara *real time*.

DPCS dapat mengawasi proses distribusi dari gudang produsen hingga kios-kios resmi. Bahkan DPCS mampu mengetahui jumlah stok saat dalam perjalanan (*intransit*). Baik darat maupun saat di pelabuhan.

Selain data stok, DPCS juga menyajikan data penjualan, alokasi pupuk subsidi di setiap daerah, kapasitas gudang, informasi distributor dan pengecer,

hingga kontak staf distribusi dan pemasaran di masing-masing wilayah. Sehingga sistem ini dapat memberikan gambaran utuh terkait pendistribusian pupuk subsidi ke berbagai daerah.

DPCS juga dilengkapi fitur peringatan dini atau *Early Warning System* untuk mendeteksi kondisi stok di daerah yang ditandai dengan indikator warna. Seperti warna hijau yang menggambarkan stok tersedia atau bahkan melebihi ketentuan pemerintah. Warna jingga menandakan stok mendekati batas ketentuan. Hingga warna merah yang berarti stok di bawah ketentuan minimum pemerintah.

"Oleh karena itu, kami senantiasa menjaga agar stok pupuk subsidi selalu berwarna hijau. Walaupun warnanya berubah, maka dengan cepat dapat terdeteksi dan kami bisa mengantisipasi dengan mengirimkan stok ke wilayah tersebut," jelas Gusrizal.

Dengan demikian, selain dapat memantau penyaluran pupuk subsidi, DPCS juga mampu meningkatkan akurasi perencanaan distribusi. Sistem ini juga menjadi alat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional distribusi. Sehingga perusahaan dapat memperkuat prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat harga. ■ IMA

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/11/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

NASIB PETANI

Beban Ganda demi Dapat Pupuk Bersubsidi

INDRAMAYU, KOMPAS — Petani di sejumlah daerah diharuskan membeli produk paketan demi mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini membuat petani harus menanggung beban ganda. Selain pupuk subsidi kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, petani juga harus membeli produk paketan yang tidak mereka butuhkan.

Di Indramayu, Jawa Barat, petani di dua kecamatan mengeluhkan sistem paketan ini. Produk paketan didistribusikan bersamaan dengan pupuk bersubsidi menggunakan truk, pertengahan Desember 2021 di Desa Kertasemaya, Kecamatan Kertasemaya.

Pengecer kemudian menjualnya bersamaan dengan pennebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Di Kios Ajij Jaya, Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, petani setempat tidak beruntung saat pengecer mewajibkan pembelian paketan bersama pupuk bersubsidi. Padahal, Ajij Jaya adalah kios resmi pupuk bersubsidi.

Di kios itu, Irul (30), petani Desa Jengkok membeli pupuk urea bersubsidi Rp 300.000 per 100 kg. Namun, selain itu, dia harus membeli produk paketan, seperti Fertiphos (produk CV Saprotan Utama) Rp 175.000 per 50 kg.

Sebenarnya dia tidak mau membeli karena tidak membutuhkannya. Namun, karena dipaketkan dengan pupuk bersubsidi, dia terpaksa menebusnya. "Kalau tidak beli paketan, tidak dapat pupuknya,"

kata Irul, Minggu (23/1/2022). Saat *Kompas* menyamar sebagai pembeli pupuk bersubsidi, penjaga kios meminta agar sekalian membeli dua paket pestisida untuk setiap dua kuintal pupuk bersubsidi. "Ini demi hubungan bisnis supaya lancar," kata Mansur penjaga kios.

Saat dikonfirmasi, pemilik Kios Ajij Jaya, Juhadi, selalu mengelak. Namun, pemilik kios tidak ada di tempat. Lewat sambungan telepon, dia hanya menjawab belum saatnya membicarakan soal pembelian paketan pupuk bersubsidi oleh petani. "Untuk saat ini mungkin belum tepat waktu karena posisi saat ini lagi sibuk tanam padi," tutur Juhadi.

Pengalaman serupa dialami petani di Kecamatan Lelea, Indramayu, Sukalim (53). Dia terpaksa membeli insektisida meski tidak membutuhkan di kios pengecer resmi. "Jika tidak beli pupuk dengan paketan tak dapat pupuk bersubsidinya. Saya tidak kenal merek itu," katanya.

Untuk menebus 1 kuintal urea bersubsidi, dia harus membeli produk paketan 4 kg. Dia menebus urea 1 kuintal Rp 230.000, sementara produk paketannya Rp 70.000 per 4 kg sehingga total menjadi Rp 300.000. Dia membeli pupuk bersubsidi dengan paketan itu di salah satu kios di Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Indramayu.

Maulani, pengelola Kios Bogor Tani, Desa Tenajarlor, Ke-

camatan Kertasemaya, Indramayu, mengakui adanya produk paketan. Dia menunjukkan produk paketan di kiosnya. Dia mengakui pengecer pupuk bersubsidi terpaksa mendapati produk paketan dari distributor resmi pupuk bersubsidi. Namun, dia tidak mewajibkan petani membeli produk tambahan saat mereka hendak menebus pupuk bersubsidi. "Saya tidak enak karena saya mengambil pupuk bersubsidi dari distributor," kata Maulani.

Burhanudin, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Kertasemaya, mengakui banyak laporan petani tentang paketan. Namun, petani belum berani mempermasalahkannya secara terbuka. "Ini bukan rahasia lagi, banyak orang sudah tahu soal ini," ujarnya.

Produk paketannya antara lain insektisida, pestisida, dan obat-obatan pembasmi hama tanaman lainnya. Burhanudin tidak tahu apakah Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) memantau hal ini. Praktik ini terjadi bertahun-tahun.

Saat dikonfirmasi, pihak distributor menampikinya. Syahrul, Accounting Manager PT Mega Utama Sakti, Indramayu, mengatakan, produk paketan tidak dipaksakan kepada petani. Menurut Syahrul, petani pasti membutuhkan obat-obatan. "Jika hanya pupuk bersubsidi, misalnya, kualitas kurang bagus," ujarnya.

Di Boyolali, kios penyalur

juga menerima produk paketan dari distributor. Namun, tidak semua kios mau menjualnya, salah satunya Tedi, seorang pengecer dengan nama samaran. Menurut Tedi, kios diikat perjanjian kerja sama dengan distributor mengenai paketan. "Itu (paketan) ada di surat pernyataan terpisah. Penyalur wajib membuat proposal berisi surat pernyataan kios untuk mengakomodasi kepentingan distributor," kata Tedi.

Di kiosnya, ada 38 botol produk paketan pupuk organik cair yang tidak dijual ke petani. Tedi belum pernah menerima pembekalan penggunaan produk itu. Apakah ada sanksi bagi kios jika tidak menjual produk distributor, Tedi menjawab, "Sanksinya berantem."

Di wilayah kerjanya, petani tidak meminta alokasi pupuk organik cair seperti yang tertuang dalam e-RDCK. Namun, distributor memberikan pupuk organik cair. Ini yang membuat Tedi tidak tega menjual ke petani. Petani pun keberatan menebus produk yang mereka belum tahu kualitasnya. "Buat apa ada produk paketan kalau kami tidak membutuhkan," kata Edy, petani di Boyolali.

Niken, distributor dari CV Persada Tani, Pupuk Sriwijaya, membantah ada produk paketan. "Kalau di kami tidak ada produk paketan. Kami hanya menyalurkan pupuk subsidi," ujarnya.

(DVD/FAL/AM/TRE/NDY)

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PERTANIAN

Tak Ada Pupuk Subsidi, Petani Tinggalkan Padi

Petani padi di Indonesia hampir selalu mengalami siklus kesulitan yang berulang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi setiap tahun. Saat dibutuhkan, pupuk telat turun. Saat turun pun, alokasinya berkurang, sedangkan harga pupuk nonsubsidi melambung. Sementara harga gabah selalu jatuh saat panen raya.

Badaruddin (48) dan Tasmiyati (56), petani Desa Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, merasakan betul kegetiran ini. Pupuk subsidi belum turun ketika masa tanam berjalan akhir 2021.

Mereka terpaksa berburu pupuk dengan harga miring. Setelah bertanya sana-sini dan adu cepat dengan sesama petani, mereka akhirnya mendapatkan pupuk subsidi, tetapi dari tetangga desa dengan harga Rp 180.000 per kemasan 50 kilogram (kg).

Harga ini lebih mahal dibandingkan dengan pupuk urea subsidi yang seharusnya, yakni Rp 125.000 per 50 kg. Akan tetapi, jauh lebih murah dari harga nonsubsidi yang saat itu tembus sekitar Rp 300.000 untuk kemasan sama.

"Ya, lebih mahal, tetapi kami sudah harus memupuk. Kalau menunggu pupuk (subsidi) turun, sudah telat," kata Badaruddin di sawahnya. Saat pupuk subsidi untuk kelompok taninya turun, uang mereka sudah habis untuk membeli sarana produksi pertanian lainnya.

Pengulangan kisah ini membuat lelah Wawan Darmawan (55), petani di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia

berencana menanam sawahnya dengan pinang. Empat dari dua hektar sawahnya disiapkan untuk alih komoditas.

Apalagi, alokasi pupuk subsidi untuk kelompoknya berkurang separuh, dari 200 kg per ha tahun lalu menjadi 100 kg pada 2021. Sementara, menurut dia, kebutuhan satu hektar sekitar 200 kg urea.

Adapun harga pupuk nonsubsidi di Desa Sumber Mulya sebesar Rp 1 juta-Rp 1,2 juta per 100 kg. Harga yang terlalu tinggi bagi mereka. "Sudah banyak sawah di sini yang mulai disiapkan untuk kelapa dan pinang. Mungkin sudah lebih dari 10 hektar karena petani ma-

kin sulit mencari pupuk subsidi," kata Wawan.

Berast

Beralih dari padi ke tanaman perkebunan bukan hal mudah bagi Wawan. Apalagi, ia tokoh petani padi di Muara Telang yang sering menjadi pembicara mengenai pemanfaatan lahan muara menjadi padi. "Namun, tidak ada pilihan, biaya hidup semakin mahal, padi sudah sulit menghidupi lagi kalau begini," ujarnya.

Dengan kondisi ini, bagi Wawan, pinang dan kelapa lebih menguntungkan. Dalam 3-4 tahun ke depan, kedua komoditas itu sudah bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 50 juta setahun atau sekitar Rp 4,2 juta sebulan per hektar.

Sementara padi hanya Rp 3 juta per bulan per hektar. "Artinya, kerja petani padi di sawah yang begitu berat itu hanya dihargai Rp 100.000 sehari. Sementara pinang dan kelapa dibiarkan saja memberi hasil. Kebutuhan pupuk juga bisa sangat kecil," kata Wawan.

Di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Muklis Suryadi (38) juga sudah menyiapkan bibit kelapa sawit. Ia akan menanam dua dari enam hektar sawahnya. Sementara 4 hektar sawah lainnya belum bisa ia alihkan komoditasnya karena tengah disewa dengan sistem bagi hasil dengan petani penggarap. Di desanya, lebih dari 10 hektar sawah sudah ditanami kelapa sawit.

Hasil dari tanaman pangan semakin lama tak menjamin kesejahteraan. Sebelum ini, Muklis menanam padi dan jagung bergantian. Untuk musim tanam ini, ia telah membeli pupuk nonsubsidi karena alokasi subsidi hanya memadai

untuk satu hektar sawah.

Bagi Muklis, dengan kondisi sekarang ini, bertani pangan seperti berjudi. Tak ada jaminan untung di panen raya. "Waktu panen raya, harga gabah malah turun, itu bisa sampai lima kali turunnya dalam sehari," kata Muklis.

Meski berat hati, semakin banyak petani pangan di kawasan itu meninggalkan padi setelah memiliki cukup modal. "Sudah puluhan hektar yang mulai disiapkan untuk beralih jadi kelapa dan pinang," kata Ketua Gabungan Kelompok Tani Manunggal Jaya, Desa Telang Jaya, Ahmad Yasir.

Jika persoalan pupuk subsidi berlarut-larut, akan semakin banyak petani berpaling dari padi.

(IRENE SARWINDANINGRUM/RHAMA PURNA JATI/
INSAN ALFAJRI/DHANANG
DAVID ARITONANG/
ANDY RIZA HIDAYAT)

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 27/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 2 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Keluarga Politisi di Jalur Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rantai distribusi memainkan peran kunci dalam pengadaan pupuk bersubsidi. Tidak mengherankan jika tokoh masyarakat yang punya kerabat politisi mengincar posisi distributor dan pengecer pupuk. Potensi suara pemilih di lahan pertanian cukup menggiurkan.

Betapa tidak, data Badan Pusat Statistik tahun 2021, secara nasional, 29,59 persen tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, atau 38,77 juta jiwa. Rantai distribusi pupuk subsidi pun bisa menjadi pijakan menarik simpati dari warga.

PT Mega Utama Sakti di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, misalnya. Perusahaan ini merupakan salah satu distributor pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu. Pemiliknya Dwi Hapsari, istri dari Syamsul Bachri, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI-Perjuangan dengan daerah pemilihan Kabupaten Indramayu.

Akhir Desember 2021, tampilan kompleks PT Mega Utama Sakti di Jalan Raya Lohbener-Jatibarang, Kabupaten Indramayu, mirip kantor partai. Gerbangnya warna merah, begitu pun bangunan, serba merah. Di samping gerbang, terpampang spanduk partai dan dilengkapi lambangnya.

Bahkan, Supendi, petugas keamanan yang bertugas Minggu (26/12/2021), merupakan kader partai. Supendi merupakan bendahara PAC PDI-P Lohbener, Indramayu. Dia sudah menjadi kader partai itu sejak 1999. Ia juga kerap turun menggalang suara saat pemilu tiba.

Syamsul Bachri mengakui sempat menjabat komisaris

utama PT Mega Utama Sakti. Namun, dia melepas jabatan itu sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ia mengaku tak ingin ada konflik kepentingan. Ia tak memungkiri, secara tidak langsung, posisinya sebagai distributor pupuk turut andil dalam menambah dukungan. "Karena saya juga ketua partai, ya, jadi diberikan dukungan. Kan ketika suaminya menjadi calon, istrinya kan juga membantu. Kebetulan istri saya bergerak dan sering berhubungan dengan kelompok tani," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Indramayu itu, Jumat (14/1).

Menarik simpati

Di Sumatera Selatan, Rudi Apriadi, pemilik PT Rudi Apriadi, yang sudah bergerak di distribusi pupuk sejak 2003 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kemudian bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN). Ia sempat menjabat sebagai Ketua DPC PAN Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan periode 2010-2015 dan duduk di kursi

Ada saja pihak yang mendaftar dengan mencatut nama-nama penting dari panggung politik lokal bahkan nasional.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi PAN periode 2014-2019.

Kendati tak menampilkan posisi distributor pupuk bisa jadi instrumen menarik simpati pemilih, Rudi mengaku tak pernah memanfaatkan posisi itu untuk perjalanan politiknya secara langsung. K-2

"Saya tidak pernah memanfaatkan pengecer atau jaringan distributor pupuk untuk menjadi tim sukses. Bahkan, pasang spanduk di kantor pun tak pernah," ujarnya.

Di sisi lain, distributor yang terjun ke politik juga membawa dampak negatif. Hubungan Rudi dengan pengecer sempat terganggu. Sejumlah pengecer ternyata terjun ke politik di tingkat lokal. Ada pengecer yang aktif sebagai pengurus partai lain, simpatisan partai lain, atau pengecer punya kerabat yang mencalonkan diri dari partai lain.

Kejadian tak enak juga dialami Muhammad Anwar, pendiri CV Fimaco, yang mendistribusikan pupuk subsidi di Tuban, Jawa Timur. Anwar pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati Tuban dari Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi tidak terpilih. Saat ini, anaknya, Muhammad Ilmi Zada, menjadi anggota DPRD Tuban dari Fraksi Demokrat.

Dia sering dituduh memanfaatkan relasi politik untuk mengamankan posisinya sebagai distributor. "Dulu saya sering diserang dengan pernyataan soal politik itu, tetapi tidak ada bukti sedikit pun saya menggunakan relasi politik supaya bisa terus jadi distributor," ujarnya.

Orang yang sama

Ombudsman RI (ORI) me-

nyoroti penunjukan distributor pupuk bersubsidi yang belum transparan. Catatan ORI dan hasil pelacakan Kompas, sebagian besar distributor pupuk subsidi adalah orang yang sama selama bertahun-tahun.

Anggota ORI, Yeka Hendra Fatika, menyebutkan, saat ini sekitar 30 persen distributor berkecimpung di politik atau mempunyai kaitan erat dengan tokoh politik ataupun partai.

Padaahal, keuntungan usaha hanya Rp 50 per kilogram (kg) di tingkat distributor dan Rp 75 per kg di tingkat pengecer. Di luar keuntungan itu, distributor wajib melakukan

pembinaan, pengawasan ke pengecer, dan penyaluran pupuk di area kerjanya.

Dari aturan, seorang distributor pupuk subsidi harus memiliki modal yang kuat. Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan, distributor harus memiliki armada transportasi, pergudangan, dan jaringan pengecer setidaknya dua pengecer di tiap kecamatan atau desa di area kerjanya.

SVP Public Service Obligation Management PT Pupuk Indonesia Eric J Rachman mengakui ada saja pihak yang mendaftar dengan mencatut nama-nama penting dari panggung politik lokal bahkan nasional, maupun pejabat daerah. Hal ini menjadi tantangan PT Pupuk Indonesia dalam menunjuk distributor secara profesional, tanpa melihat afiliasi politiknya.

(IRE/DVD/FAI/RAM/NDY)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

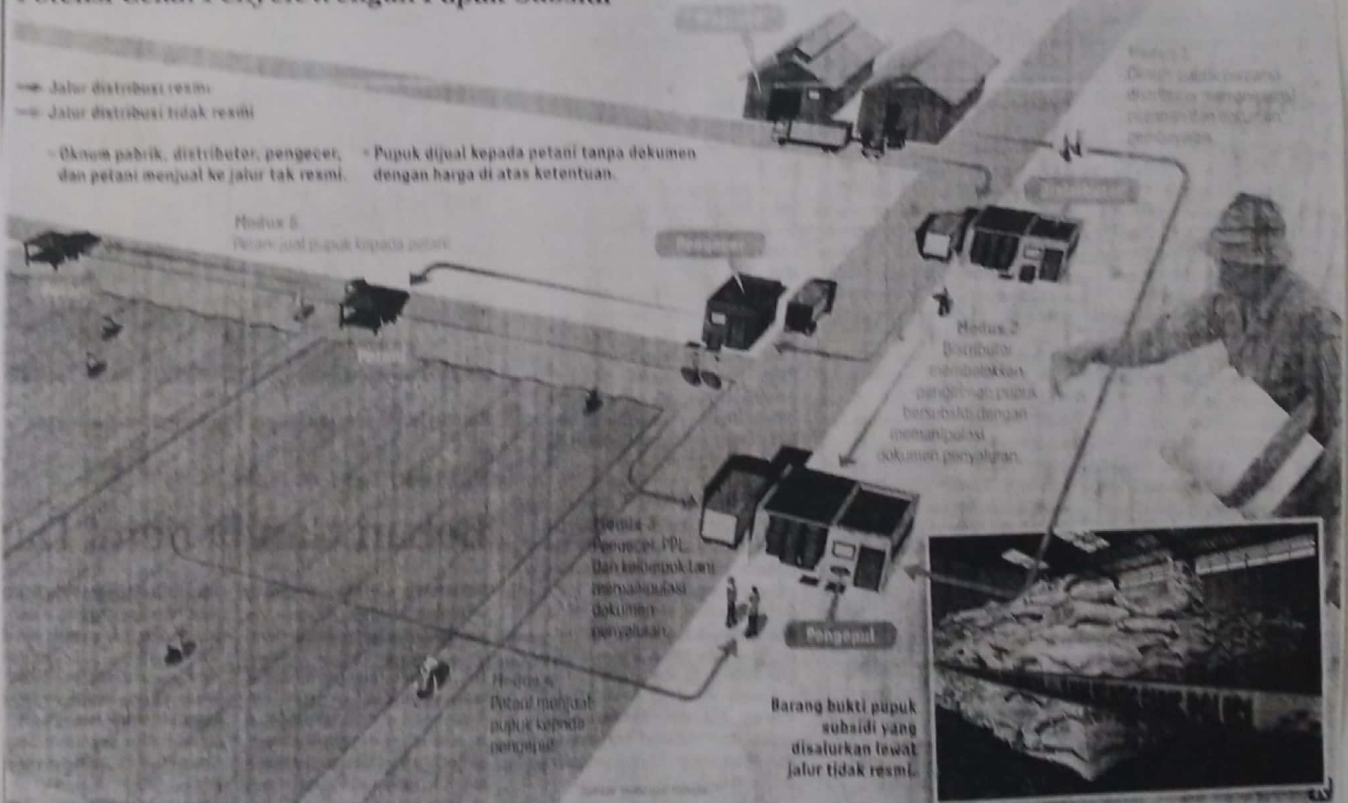
MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Berita Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Sindikat Menguasai Pupuk Bersubsidi

Investigasi harian Kompas mengungkap sindikat ilegal yang menguasai pupuk bersubsidi di sejumlah daerah. Produsen pupuk, distributor, kios resmi, dan oknum petugas diduga terlibat.

Potensi Celah Penyelewengan Pupuk Subsidi



BANDUNG, KOMPAS — Pupuk bersubsidi di sejumlah daerah dikuasai sindikat distributor dan pedagang ilegal. Mereka diduga mendapatkan pasokan dari penyalur dan distributor resmi dalam jumlah besar. Petani pun terpaksa membeli pupuk ber-

subsidi di atas ketentuan harga eceran tertinggi.

Investigasi harian Kompas melacak praktik penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini dilakukan selama Desember 2021-Januari 2022. Penelusuran menemukan sindikat tak berizin dapat memperdagang-

kan dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada siapa pun tanpa acuan harga.

Padaahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 menyebutkan, penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui distributor resmi yang ditunjuk PT Pupuk Indonesia. Adapun

yang berhak menjual pupuk bersubsidi kepada petani hanya kios yang ditunjuk menjadi distributor resmi.

Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

terdapat dalam Rencana Definisi Kebutuhan Kelompok (RD-KK). RDKK disusun kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta disahkan

Kementerian Pertanian. Setiap tahun pemerintah menentukan alokasi pupuk subsidi per daerah. Tak boleh ada pupuk subsidi untuk daerah tertentu mengalir ke daerah lainnya.

Namun, di sejumlah daerah, pupuk subsidi dikuasai pedagang ilegal di jalur tidak resmi. Dari sini terjadi penyelundupan pupuk bersubsidi antardaerah. Petani membelinya ke joki, calo, juragan, dan tengkulak pupuk dengan harga mahal. Di jalur tak resmi ini siapa pun bisa membeli pupuk subsidi, termasuk pemilik perkebunan.

Di Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, juragan pupuk bernama W menguasai ratusan karung pupuk bersubsidi kemasan 50 kg. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, W tidak tercatat sebagai distributor atau pemilik kios resmi pupuk bersubsidi. "Kalau akang perlu, beli di sini. Nanti dibawa ke mana mah terserah, mau dibawa ke mana. Tetapi, saya mah tanggung jawabnya di sini saja. Tetapi saya minta KTP-nya," kata W kepada *Kompas* yang menyamar sebagai pembeli, Jumat (21/1/2022).

W memiliki gudang penyimpanan pupuk, toko, truk, dan pegawai pemasaran. Dia diduga tak hanya menjual pupuk bersubsidi ke wilayah Bandung dan sekitarnya, tetapi juga ke daerah lain, seperti Indramayu.

Seorang PPL di Indramayu pernah melaporkan penyaluran ilegal itu ke kepolisian. Namun, oknum polisi memintanya tidak memperpanjang laporan itu. PPL ini menuturkan pupuk bersubsidi di Indramayu berasal dari W. Keyakinannya berasal dari komunikasinya

dengan W lewat perantara sopir truk pengangkut pupuk. Ada rekaman video saat penyaluran pupuk subsidi dari daerah lain ke Indramayu. Dalam rekaman, terlihat seorang polisi bertanya kepada sopir truk tentang asal pupuk. Sopir itu mengaku pupuk bersubsidi tersebut milik W.

Sementara warga di Kecamatan Lelea, Indramayu, juga pernah menyaksikan pembongkaran pupuk bersubsidi bukan di distributor ataupun kios resmi. Pupuk bersubsidi tersebut ditampung di rumah seorang berinisial A yang dikenal sebagai warga negara asing.

"Itu ilegal, bukan dari jalur kami," kata Syahrul, Accounting Manager PT Mega Utama Sakti (MUS), distributor resmi pupuk bersubsidi di Indramayu. PT MUS sudah melaporkan peristiwa itu ke Polres Indramayu. "Saya juga sudah lapor ke Polres," kata Syahrul.

Namun, Polres Indramayu mengaku belum mendapatkan laporan. "Kami tak dapat informasi sama sekali," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu Ajun Komisaris Luthfi Olot Gigantara.

Joki

Di Jawa Timur, peredaran pupuk bersubsidi ilegal melibatkan sindikat antar-kabupaten. Pupuk bersubsidi di Tuban dipasok melalui joki atau pengepul besar dan kecil. Joki besar diduga mendapatkan pupuk bersubsidi dari Madura.

Saat menelusuri praktik penyaluran pupuk bersubsidi melalui joki di Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Tuban, *Kompas* bekerja sama dengan petani setempat untuk membuktikan pupuk bersubsidi di daerah itu dijual di atas HET. Harga pupuk Rp 180.000-Rp 200.000 per zak

(50 kg). Padahal, HET pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK Rp 112.500-Rp 120.000. Transaksi pupuk di joki tanpa syarat-syarat penebusan seperti diatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Tahun 2021.

Distributor resmi di Kecamatan Kerek, PT KSU Jaya Bersama, Neffi Mudholifati, mengakui praktik itu. "Pelaku-pelaku di lapangan bukan orang-orang di kios resmi. Saya pernah lapor (ke polisi)," tutur Neffi.

Kepala Polres Tuban Ajun Komisaris Besar Darman tidak merespons konfirmasi mengenai laporan penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayahnya. Lewat pesan singkat, Darman menanyakan, "Masalah apa, Mas?" Saat ditanya soal pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, ia tidak menjawab lagi.

Dari kesaksian warga, penyaluran pupuk ilegal ke Tuban menggunakan truk berpelat M, nomor kendaraan di wilayah Madura. Pupuk bersubsidi asal Madura diduga kuat juga beredar di Nganjuk.

Pekan lalu, Polres Nganjuk mengungkap kasus penimbunan pupuk bersubsidi dengan barang bukti 114 ton. L (38), warga Nganjuk, membeli pupuk dari H (23) di Kediri. H adalah penghubung pedagang besar berinisial N (36) di Malang. Adapun gudang pupuk ada di perbatasan Jatim-Jateng. "Karena lokasi penanganan kasus ada di wilayah-wilayah lain, kami berkoordinasi dengan Polda Jatim atau Bareskrim Polri," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk Ajun Komisaris I Gusti Agung Ananta.

Senior Executive Vice President Pemasaran PT Pupuk Indonesia Gatoet Gembiro mengakui semua pihak di jalur penjualan dan distribusi punya kemungkinan menyelewengkan pupuk bersubsidi. (DVD/IRE/TAI/RAM/NDW)

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Penyalur Jual Bebas Pupuk Subsidi

Sebagian penyalur resmi pupuk bersubsidi ternyata malah memberatkan petani. Mereka menjual pupuk dengan bebas tanpa mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK petani.

TUBAN, KOMPAS — Penyalur resmi diduga kuat menabrak aturan penebusan pupuk bersubsidi yang merugikan petani. Tidak hanya menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), mereka juga membebaskan penebusan pupuk oleh siapa saja tanpa menggunakan KTP ataupun kartu tani.

Praktik ini melanggar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Pupuk bersubsidi hanya boleh dijual kepada petani yang terdaftar di RDKK. Setiap tahun pemerintah menentukan alokasi pupuk subsidi setiap daerah, berdasarkan RDKK yang disusun kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta disahkan pemerintah.

Di lapangan, aturan ini ditabrak oleh pihak yang seharusnya menjadi penjual resmi pupuk subsidi. Di Desa Jengklok, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Mansur, seorang penjaga kios resmi pupuk subsidi, Kios Ajiy Jaya, menyanggupi penjualan NPK Phonska satu karung (50 kg) dengan harga Rp 250.000. Harga ini jauh di atas HET (Rp 115.000) per zak ke-

masan 50 kg sesuai Permentan No 49/2020. Mansur juga tidak meminta syarat kartu tani, KTP, ataupun syarat-syarat lain.

Petani setempat membeli pupuk subsidi jenis Urea dan NPK Phonska di atas HET berkisar Rp 150.000-Rp 250.000. Untuk bisa membeli pupuk subsidi dengan harga tersebut, petani pun dibebani produk paketan berupa pestisida dan pupuk jenis lain, yang harus dibeli seharga Rp 100.000-an.

Khoirul Amin (30), petani di Desa Jengklok, membeli pupuk Urea bersubsidi dua zak seharga Rp 300.000. "Ketika menebus pupuk pakai paketan, saya enggak pakai data. Saya datang, bawa uang, dan pulang. Saya juga tidak tahu berapa jatah saya di RDKK," kata Khoirul, Kamis (20/1/2022).

Pemilik Kios Ajiy Jaya, Juhaedi, menolak memberi penjelasan terkait penjualan pupuk subsidi di atas HET. "Mohon maaf untuk saat ini saya sedang sibuk mengurus sawah saya yang kebanjiran. Saya juga sedang kekurangan orang untuk menggarap sawah, jadi belum bisa diwawancara," katanya.

Keberatan

Atas masalah ini, petani berkekeluh kesah dan mengadakan diam-diam kepada PPL. Kios

resmi yang menjual pupuk subsidi di atas HET dianggap melanggar aturan. "Petani sangat keberatan, pengecer jelas-jelas melanggar aturan pemerintah," kata PPL Kecamatan Lelea, Burhanudin.

Sebagai pendamping petani, mereka berharap Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) ikut membantu petani. Sebab, KP3 yang terdiri dari beberapa unsur lembaga pemerintah memiliki kewenangan menindak pelanggaran penebusan pupuk bersubsidi.

Terkait dengan penindakan terhadap kios-kios resmi yang menjual pupuk subsidi di atas HET di Jawa Barat, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Ibrahim Tompo akan mencari tahu lebih lanjut tentang persoalan itu. "Nanti kami perjelas dahulu. Kami konfirmasi nanti setelah ada hasilnya," ujarnya.

Bukan hanya di Indramayu, penjualan pupuk subsidi di atas HET juga terjadi di Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kompas sempat bekerja sama dengan petani setempat untuk membuktikan praktik yang melanggar ketentuan itu. Petani dari desa lain bisa membeli pupuk subsidi tanpa harus menunjukkan Kartu Tani.

Salah satu penyalur resmi yang menjual pupuk subsidi di atas HET ada di Kecamatan Grabagan. Di kios ini, pupuk subsidi jenis NPK Phonska dijual Rp 190.000 per karung (50 kg) dan Urea seharga Rp 200.000 per karung (50 kg). Sementara dalam Permentan No 49/2020, HET pupuk Urea subsidi hanya Rp 112.500 per karung (50 kg). Pengelola kios menyimpan pupuk di salah satu ruang di rumahnya. "Silakan ambil sendiri, tadi pesannya itu satu karung NPK Phonska dan Urea, ya," kata Samsiati, penjaga kios.

Petani di Terkait dugaan penyelewengan penyaluran pupuk subsidi di Tuban, Grabagan rela membeli pupuk subsidi dengan harga mahal karena mereka tidak sanggup membeli pupuk nonsubsidi. "Kalau beli pupuk NPK nonsubsidi per karung (25 kg), harganya bisa sekitar Rp 250.000. Kalau beli 50 kg, jadi sekitar Rp 500.000. Selisih harganya sangat jauh dengan pupuk subsidi. Ongkos produksi pun jadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual padi," ujar salah satu petani di Grabagan, Qayim.

Minim pengawasan

Maraknya penjualan pupuk subsidi di atas HET oleh ki-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

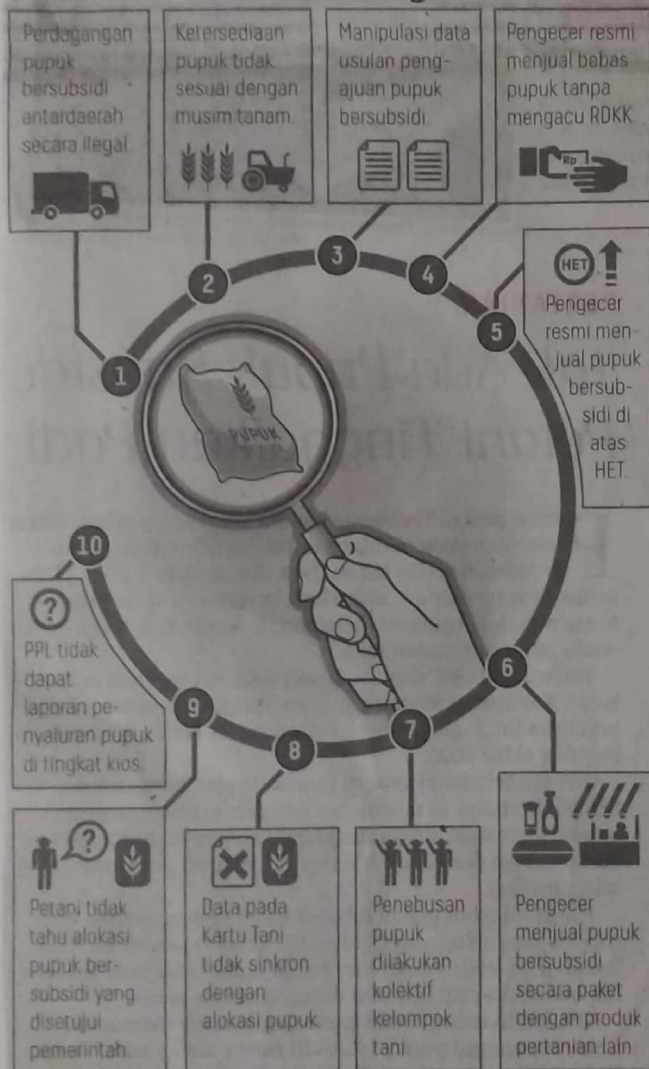
SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Temuan-temuan Tim Investigasi



Sumber: Pemecan 48 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2021

INFOGRAFI DICKY

os-kios resmi disebabkan kurangnya pengawasan dari KP3 di tiap daerah. Selain itu, tidak ada sanksi tegas bagi para pengelola kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET.

Sesuai Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan No.15/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, setiap kios resmi yang melakukan pelanggaran dengan menjual pupuk di atas HET harus dicabut izin usahanya.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jatim, Adi Mawardi, pupuk bersubsidi menyisakan banyak masalah karena pengawasannya sangat longgar. Ini lantaran KP3 pun belum bekerja efektif. "Selama ini kami tidak pernah tahu hasil pengawasan mereka seperti apa," katanya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban Ajun Komisaris M Adhi Makayasa menuturkan, telah menindak kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayahnya. "Tahun 2021 kami menindak pelaku pelanggaran peredaran pupuk bersubsidi. Kami akan intens untuk mengecek distributor dan juga kios yang ada di Tuban. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan pupuk bersubsidi, silakan laporkan ke Satreskrim Polres Tuban," ujarnya, Selasa (25/1).

Sementara hingga Rabu (26/1), Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Gatot Repli Handoko belum menjawab pertanyaan soal penyelewengan pupuk subsidi di Jatim. (DVD/FAI/TRE/RAM/NDY)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mentan Dorong Inovasi Pertanian Adaptif Iklim

JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terus mendorong inovasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sebab, sektor pertanian saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang menjadi ancaman bagi upaya peningkatan produksi pertanian. Tantangan itu adalah sumber daya lahan dan air yang semakin terbatas serta adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu, munculnya iklim ekstrem, serta terjadinya pergeseran pola musim dan curah hujan.

Mentan Syahrul menyatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) harus bisa membaca perubahan iklim dan beradaptasi dengannya. Bentuk adaptasi itu ditunjukkan dengan menghasilkan varietas benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. "Kita harus terus mendorong inovasi pertanian untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Seperti bagaimana menghasilkan varietas yang tahan kering sampai tahan rendam, ataupun varietas yang bisa ditanam di lahan kering atau lahan rawa," ungkap Mentan saat pengukuhan Fadry



Syahrul Yasin Limpo

Djufry sebagai Profesor Riset Kementan di Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Karena itu, Mentan menghargai ide dan pemikiran yang disampaikan Fadry Djufry pada orasinya yang mengangkat tema Pertanian Cerdas Iklim Inovatif Berbasis Teknologi Budidaya Adaptif Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan. "Saya yakin pemikiran Prof Fadry pada orasi ini adalah akumulasi kegelisahan kita semua. Tanpa ada riset dan

teknologi, di saat anomali iklim semakin tidak terprediksi, bisa hancur kita. Ini adalah kesempatan semua pejabat dan politisi untuk berbicara dan berpikir mengenai dampak perubahan iklim," ujar Mentan Syahrul. Mentan berharap, peran profesor riset di Balitbangtan bisa ikut memperkuat makna penelitian bagi sektor pertanian.

Dalam orasinya, Fadry memaparkan tentang pertanian cerdas iklim inovatif yang berbasis teknologi budidaya adaptif dan menawarkan konsep Pertanian Cerdas Iklim Inovatif (PCII) yang merupakan pengembangan dari Climate Smart Agriculture yang dicetuskan FAO pada 2013 sebagai solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi perubahan iklim. PCII disesuaikan dengan tantangan riil kondisi pertanian Indonesia saat ini, perkiraan keadaan ke depan, serta diperkaya dengan berbagai inovasi teknologi budidaya hasil penelitian di berbagai lokasi dan agroekosistem Indonesia, dan didukung Sistem Informasi Iklim dan Tanaman. Konsep PCII sangat relevan dengan beberapa program strategis Kementan terutama *food estate* pada lahan rawa dan lahan kering serta lahan kering beriklim kering. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Harga Beras Stabil sampai Panen Raya

JAKARTA – Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) memperkirakan, situasi harga beras tetap stabil sampai memasuki puncak panen padi pada Maret mendatang. Dinamika harga dalam beberapa hari terakhir hanya efek psikologis karena saat ini belum memasuki panen raya. "Harga beras diproyeksikan mengikuti tren kenaikan hingga 0,1% atau sekitar Rp 100-200 hingga Februari 2022 sebagai dampak psikologis menjelang panen raya awal Maret 2022," ujar Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan BKP Kementan Risfaheri dalam keterangan Kementan, kemarin.



Risfaheri

Berdasarkan hasil pemantauan harga pangan strategis yang dilakukan oleh Panel Harga Pangan BKP Kementan, harga rata-rata beras hingga minggu kedua Januari 2022 masih terpantau stabil. Harga beras rata-rata nasional untuk beras medium Rp 10.918 per kilogram (kg) dan premium Rp 12.475 per kg. Bila dibandingkan waktu yang sama pada 2020, beras medium Rp 11 ribu per kg dan premium Rp 12.384 per kg, sedangkan pada 2021 beras medium Rp 10.907 per kg dan premium Rp 12.542 per kg. "Permintaan beras meningkat karena perekonomian mulai menggeliat, sementara saat ini belum memasuki musim panen raya. Namun kita pastikan stok tetap aman dan terkendali," jelas dia.

Berdasarkan data produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahun selalu terjadi surplus (produksi-kebutuhan). Pada 2019, surplus pada tahun berjalan 2,28 juta ton, pada 2020 surplus tahun berjalan 1,95 juta ton, dan pada 2021 surplus tahun berjalan diperkirakan 2,21 juta ton. Surplus produksi itu cukup aman untuk menutup defisit produksi pada Januari ini sekitar 1,29 juta ton, pada Februari 2022 sudah mulai terjadi surplus pada bulan berjalan karena produksi sudah melebihi kebutuhan yaitu 1,17 juta ton. Saat ini, stok di Bulog sekitar 985 ribu ton, cukup untuk operasi pasar dalam mengatasi gejolak harga. Pantauan harga beras rata-rata di Pasar Induk Cipinang Jakarta pada Januari 2020 adalah Rp 10.082,15 per kg, Januari 2021 sebesar Rp 9.999,40 per kg, dan

KTB siap mendukung pelanggan dengan solusi total: ketersediaan suku cadang dengan harga terjangkau. Selain itu menyediakan lebih banyak lokasi *2S Fleet Workshop*, dan menambah operasi *Mobile Workshop Service*. "Kami akan bekerja sama dengan pelanggan secara intensif untuk kesuksesan bisnis mereka yang berkelanjutan," ujar dia.

KTB juga mengumumkan agenda terbaru mereka terkait *Electric Vehicle (EV)*. KTB akan mengadakan pembuktian konsep (*proof of concept*) di Indonesia untuk mempelajari kebutuhan pelanggan secara akurat. Momen perkenalan yang sesungguhnya akan ditentukan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	27 / 1 / 2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	9 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika			☐ Pojok/Karikatur

Awasi Distribusi Migor

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
BINTI SHOLIKAH

JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan, kegiatan produksi minyak goreng dalam kondisi normal dan tidak terjadi gangguan. GIMNI meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat dalam proses distribusi hingga tingkat hilir jika ditemukan kelangkaan pasokan minyak goreng murah.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga menegaskan, produksi minyak goreng berjalan seperti biasa meskipun pemerintah telah menjalankan program minyak goreng satu harga sebesar Rp 14 ribu per liter dengan skema subsidi. Ia pun mempertanyakan adanya kelangkaan pasokan seperti yang terjadi di toko ritel modern.

"Biasanya, di ritel itu (ketahanan) stoknya dua bulan, sekarang itu habis. Nah itu kenapa? Berarti ada yang bermain? Kami sudah wanti-wanti itu jauh sebelumnya perlu dibuat pengawasan yang lebih ketat," kata Sahat kepada *Republika*, Rabu (26/1).

Sahat mempertanyakan, apakah ritel modern telah melakukan *purchase order* (PO) atau belum jika telah kehabisan stok. Sebab, berdasarkan informasi yang ia peroleh, belum ada PO tambahan dari toko ritel modern. "Jadi, menurut hemat saya, mungkin kebijakan minyak goreng satu harga ini perlu dilihat lagi," katanya menambahkan.

Sahat menekankan, kebijakan minyak goreng satu harga dibuat pemerintah dengan asumsi semua pihak terkait dapat jujur dan transparan. Namun, ketika terjadi persoalan seperti kelangkaan pasokan maka perlu ada strategi lain yang dilakukan.

Adapun untuk penyediaan minyak goreng murah di pasar tradisional yang sesuai rencana Kemendag dimulai pada Rabu (26/1), Sahat mengatakan, perusahaan-perusahaan anggota sudah terjun langsung ke pasar tradisional untuk mem-

bantu proses distribusi minyak goreng satu harga. Namun, Sahat tidak dapat memerinci pasar mana saja yang saat ini mendapatkan pasokan minyak goreng murah. "Tapi, itu sudah mulai jalan," ujarnya.

Program minyak goreng satu harga telah dijalankan sejak Rabu pekan lalu yang lebih dahulu dimulai di toko ritel modern. Adapun pada Rabu pekan ini, program tersebut sedianya dijadwalkan berjalan di pasar tradisional. Sejak program migor satu harga berlaku, warga ramai-ramai membeli minyak goreng di toko ritel modern. Di berbagai daerah, stok minyak goreng di swalayan habis dalam hitungan jam setiap harinya.

Di Kota Solo, Jawa Tengah, harga minyak goreng di Pasar Legi masih berada di kisaran Rp 18 ribu-Rp 19 ribu per liter.

Salah satu pedagang bernama Ari (32) mengatakan, harga di tingkat agen masih tinggi. Meski harga jual masih mahal, Ari menyebut tetap banyak konsumen yang membeli minyak goreng. "Tetap ada yang beli. Soalnya minyak goreng subsidi di *supermarket* kosong. Mereka bilang *mending* beli di pasar, barangnya sudah pasti ada," ucap dia.

Tidak memadainya stok migor di toko ritel modern juga terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel mengaku, ada kendala penyaluran minyak goreng Rp 14 ribu per liter di daerahnya. Hal itu menyebabkan stok atau ketersediaan minyak goreng di toko ritel modern mengalami kelangkaan.

"Kendalanya di ritel, stok sedang langka. Setelah diinvestigasi, pengiriman tersendat dari distributornya karena produsen banyak menarik minyak kemasan yang premium," ujar Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Kota Tangsel, Ghazali saat dihubungi, Rabu (26/1).

■ eva rianti ed: satna kartika yudha

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Migor Rp 14 Ribu Belum Merata di Pasar

■ BOWO PRIBADI,
MURSALIN YASLAND

JAKARTA — Program minyak goreng (migor) satu harga mulai dijalankan di pasar tradisional pada Rabu (26/1). Namun, pengimplementasiannya belum merata di semua daerah. Pedagang pasar di banyak wilayah belum bisa menjual minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter karena belum mendapat pasokan dari distributor. R. 1

Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, warga sudah bisa menemukan minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter di pasar tradisional. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang mengklaim program mi-

nyak goreng satu harga sudah berjalan di semua pasar tradisional.

"Setelah sebelumnya berlaku di toko modern, mulai Rabu ini minyak goreng satu harga juga sudah berlaku di pasar tradisional," kata Kepala Diskumperindag Kabupaten Semarang Heru Cahyono, Rabu (26/1).

Menurut Heru, minyak goreng satu harga tidak hanya diberlakukan di pasar tradisional besar, seperti Pasar Bandarjo, Pasar Projo Ambarawa, dan Pasar Kembang Sari Tenganan. Dia mengatakan, kebijakan ini berlaku di semua pasar di Kabupaten Semarang.

Iin (37 tahun), salah seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, mengaku sudah bisa mendapatkan minyak goreng



● Pedagang menata minyak goreng kemasan yang dijual di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (24/1).

dengan harga Rp 14 ribu per liter di pasar tradisional. Ia sebelumnya sempat mencoba membeli minyak goreng di toko ritel modern, tetapi tidak mendapatkannya karena stok sudah habis.

Ia pun langsung mencari ke pasar tradisional dan mendapatkannya. Menurut dia, pemberlakuan minyak goreng satu harga di pasar tradisional sangat membantu masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga.

"Beberapa bulan terakhir, kita kan kesulitan mendapatkan harga minyak goreng di bawah Rp 20 ribu per liter, sekarang sudah berlaku di pasar tradisional. Sangat menolong," kata Iin.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskumperindag Kabupaten Semarang, Widada Mutiara, menjelaskan, harga minyak yang dikirim produsen ke pedagang sudah berada di bawah Rp 14 ribu per liter. Atas alasan itulah, pedagang di pasar bisa menjual minyak goreng sesuai

harga yang ditetapkan pemerintah.

Di daerah lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyatakan, bakal menerapkan kebijakan satu harga di pasar tradisional pada Kamis (27/1). "Kami sudah menggelar rapat koordinasi kebijakan minyak goreng satu harga," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disprindag Lampung M Zimmi, Rabu (26/1).

Rakor tersebut turut diikuti produsen dan distributor minyak goreng di Lampung. Zimmi mengatakan, hasil rakor memutuskan mulai Kamis sudah dapat diberlakukan migor kemasan berbagai merek satu harga Rp 14 ribu per liter di pasar tradisional Bandar Lampung dan di daerah lainnya.

"Disperindag akan memantau pelaksanaan migor satu harga tersebut di pasar dan akan melakukan evaluasi," katanya, kemarin.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Mengenai keluhan pedagang yang masih memiliki stok lama dengan modal di atas harga eceran satu harga, dia mengatakan, pedagang tersebut dapat menukar atau mengembalikannya ke distributor atau produsen dengan harga normal. Menurut dia, skema tersebut telah disetujui produsen dan distributor pada rakor tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya akan melibatkan Satgas Pangan Polda Lampung setelah program tersebut berjalan selama tiga hari. "Ini untuk mengetahui kondisi stok migor di pasaran, apakah terjadi kekosongan atau penimbunan, atau berjalan normal."

Pedagang di Pasar Pasir Gintung, Hasan, mengaku sejak pemberlakuan migor satu harga di toko ritel, stok migor miliknya masih utuh. Menurut Hasan, tidak ada sama sekali pembeli migor di tokonya karena masyarakat sudah membeli di toko ritel dengan harga lebih murah.

"Kami masih menjual minyak goreng Rp 20 liter bergantung merek, ada yang Rp 19 ribu. Sekarang tidak ada yang beli karena Indomaret dan Alfamart lebih murah," tutur Hasan.

Ia menyambut baik rencana pemerintah memberlakukan satu harga migor di pedagang pasar tradisional, tetapi stok migor dengan modal awal yang mahal harus dicarikan solusinya.

"Jangan sampai pedagang rugi dua kali, sudah modal tidak kembali, harus menutupi kekurangan harga lagi karena jauh harganya," kata Hasan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Gowa, Sulawesi Selatan, menyampaikan, sebagian

pedagang di tingkat pengecer ada yang menjual minyak goreng pada harga Rp 14 ribu per liter, sementara yang belum masih diberikan kesempatan beberapa hari untuk menyesuaikan.

Dari hasil pemantauan, disebutkan harga minyak goreng sudah berada Rp 14 ribu per liter, khususnya di pasar-pasar ritel modern, sementara untuk harga minyak goreng di pasar tradisional masih menggunakan harga sebelumnya. "Untuk pedagang tradisional, diberi waktu tujuh hari untuk melakukan penyesuaian ke harga Rp 14 ribu per liter. Karena, memang barang yang dijual di pasar tradisional itu barang yang tidak bisa kembali, makanya ini harus dihabiskan dulu," kata Kepala Disperindag Gowa, Andi Sura Suaib, kemarin.

Saat ini, pembelian minyak goreng di pasar-pasar modern dibatasi 4 liter per orang. Kebijakan ini untuk membantu para pedagang tradisional menghabiskan stok minyak yang masih ada.

"Saya akan menemui distributor minyak goreng bagaimana membantu atau ada kebijakan untuk para pedagang tradisional. Kami juga akan terus melakukan pemantauan harga," ungkapnya.

Di banyak daerah, program satu harga belum bisa diterapkan di pasar tradisional. Di Kota Bogor, Jawa Barat, sejumlah pedagang di pasar tradisional ma-

sih menetapkan harga minyak goreng senilai Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per liter.

Kepala Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKM-Dagin) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, mengatakan, kebijakan satu harga untuk minyak goreng dari pemerintah pusat sampai saat ini hanya untuk di ritel modern.

"Kalau untuk di pasar tradisional, kami enggak bisa memaksa dan menekan harga pasar. Kalau harga ritel sudah Rp 14 ribu, pasti di bawah itu ya," kata Ganjar saat dikonfirmasi, Rabu (26/1).

Direktur Bahan Pokok dan Penting Kementerian Perdagangan Isy Karim sebelumnya mengatakan, beberapa produsen sudah menarik stok dengan harga lama dari para pedagang. Ia mengatakan, penyediaan minyak goreng murah membutuhkan proses agar dapat tersedia secara masif di seluruh Indonesia.

■ shabrina zakaria/antara
ed: satria kartika yudha

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 27 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Awasi Distribusi Minyak Goreng

Ritel Modern Baru Terima Sekitar 5% Pasokan Minyak Goreng Bersubsidi



TOFAN MAHDI

Ketua Bidang Komunikasi Gapki

Tak ayal, toko ritel modern pun kewalahan melayani konsumen. Banyak toko ritel modern yang kehabisan stok minyak goreng bersubsidi tersebut. Akibatnya, banyak calon konsumen yang tidak mendapatkan minyak goreng bersubsidi tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi mengatakan, pemerintah perlu memperketat pengawasan pendistribusian minyak goreng bersubsidi tersebut. Pengawasan harus dilakukan di

JAKARTA - Pemerintah telah menerapkan kebijakan satu harga untuk meredam melonjaknya harga minyak goreng. Namun, kebijakan ini direspons konsumen dengan memborong minyak goreng (*panic buying*) yang dibanderol Rp14.000 per liter tersebut.

seluruh mata rantai distribusi mulai dari produsen minyak goreng, distributor, agen, toko ritel modern, hingga pengecer.

"Kamidari Gapki mendukung kebijakan satu harga ini. Ini adalah kebijakan yang *win-win solution* dalam menyikapi melambungnya harga minyak goreng ini. Tapi, yang perlu menjadi perhatian sekarang ini dan ke depan adalah soal pengawasannya," kata Tofan Mahdi, saat menjadi narasumber pada acara Podcast Ngopibareng 'Bikin Emak Menjerit, Blak-Blakan Pengusaha Minyak Sawit', kemarin.

Pengawasan distribusi merupakan persoalan yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk mencapai keberhasilan program ini. Karena, pada da-

sarnya, kata Tofan, pasokan minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang menjadi bahan baku minyak goreng sangat mencukupi.

"Saya tegaskan di sini bahwa pasokan CPO untuk produsen minyak goreng sangat mencukupi. Justru yang menjadi persoalan sekarang adalah ketersediaan minyak goreng bersubsidi di pasaran. Nah inilah pentingnya pengawasan," katanya.

Terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi ini, pengusaha ritel pun menolak dijadikan kambing hitam. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menegaskan, kelangkaan minyak goreng di ritel modern bukan tanggung jawab peritel, melainkan pihak distributor.

Menurut Roy, peritel yang

tergabung dalam Aprindo hanya menjadi penyedia tempat untuk distribusi minyak goreng subsidi kepada masyarakat, bukan pemasok. "Masalahnya, bukan di ritel, karena ritel *nggak* bisa produksi minyak. Masalahnya itu di pasokan para distributor. Kita ini *kan* cuma warung," kata Roy, saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), kemarin.

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir beberapa ritel modern seperti Alfamart, Indo-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

maret, dan sejenisnya mengalami kehabisan stok minyak goreng. Pegawai di salah satu minimarket saat ditemui tim MPI mengaku stok minyak goreng Rp14.000 ludes dibeli ibu-ibu hanya dalam beberapa jam setelah barang dikeluarkan dirak penyimpanan.

"Jadi, kalau sudah dibeli oleh ibu-ibu di luar sana, kalau *nggak* ada yang pasok atau pihak distributor tidak mengirim ke ritel, ritel bisa apa? Karena, ritel *kan* tempat jualan saja," tutur Roy.

Terkait minimnya pasokan minyak goreng ini, disinyalir ada pihak distributor dan produsen yang tidak menjalankan komitmennya dalam mendukung program pemerintah. Alhasil, pasokan ke ritel pun terbatas. "Distributor dan produsen ini tidak komit terhadap program pemerintah. Kalau Aprindo, *kan* sudah komit," tandasnya.

Roy Mandey membeberkan bahwa pasokan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter yang

digelontorkan ke ritel modern baru terserap kurang dari 5% dari jatah 10% per bulan.

Adapun total minyak goreng yang diguyurkan pemerintah sebanyak 250 juta liter per bulan. Dengan asumsi 10%-nya didistribusikan ke ritel modern, maka peritel menerima 25 juta liter per bulan.

"Skemanya sudah jelas, komitmen pemerintah *kan* 250 juta liter sebulan lewat para produsen minyak goreng dan distributor untuk masuk ke ritel, pasar tradisional, operasi pasar. Tapi, dari 250 juta liter itu, ritel hanya 10%, jadi hanya butuh 25 juta liter per bulan. *Nah*, yang 10% ini saja belum terpenuhi, apalagi yang 90%. Saat ini saja baru masuk *nggak* sampai 5%," ungkap Roy.

Berkaca dari kondisi pasokan ke ritel modern yang masih kurang, Roy pun tidak heran jika hingga kemarin minyak goreng satu harga belum terdistribusi ke pasar-pasar

tradisional.

"Sebanyak 25 juta liter minyak goreng saja belum terpenuhi ke ritel modern, bagaimana ke pasar (tradisional) hari ini yang sudah mulai berlaku? *Pastinya* bisa. Karena, di ritel saja *nggak* pasok," tuturnya.

Roy mengharapkan ada kerja sama yang baik antara produsen dan distributor demi kelangsungan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat minyak goreng merupakan bahan kebutuhan pokok yang penting bagi ibu rumah tangga maupun pelaku usaha makanan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14.000 per liter, yang pada tahap awal tersedia di toko ritel modern mulai Rabu (19/1) lalu. Selanjutnya, terhitung mulai kemarin, minyak goreng subsidi tersebut akan tersedia di pasar tradisional. **■ sudarsono/ advenia elisabeth**

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 27 / 1 / 2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Waspada Inflasi Tinggi Tahun Ini

Disrupsi rantai pasok, pengetatan kebijakan moneter, serta lonjakan harga energi dan pangan diperkirakan mendorong inflasi tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS — Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan inflasi global pada tahun ini bakal tinggi. Setiap negara perlu mewaspada dan mengantisipasi peningkatan inflasi itu agar tidak membebani masyarakat, terutama penduduk miskin. K. G.

Dalam tinjauan perekonomian dunia bertajuk "Lonjakan Kasus, Disrupsi Pemulihan dan Inflasi Tinggi" yang dipublikasikan pada 25 Januari 2022, IMF memperkirakan, inflasi di negara-negara maju pada 2022 sebesar 3,9 persen dan negara-negara berkembang 5,9 persen. Inflasi itu disebabkan oleh disrupsi rantai pasok, pengetatan kebijakan moneter, lonjakan harga energi dan pangan, serta peningkatan permintaan.

First Deputy Managing Director of IMF Gita Gopinath mengatakan, inflasi bakal meningkat, terutama akibat tekanan harga energi dan pangan yang bakal berlangsung lama. Pasar bursa mengindikasikan, pada tahun 2022, harga minyak mentah akan meningkat 12 persen, gas alam naik 58 persen, dan pangan naik 4,5 persen.

Gangguan rantai pasok akibat penyebaran virus korona varian Omicron di sejumlah negara ju-

ga diperkirakan masih terjadi. Hal itu telah berimbas pada kenaikan biaya logistik dan produk-produk impor. "Di tengah tekanan itu, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di seluruh dunia diperkirakan 70 juta jiwa," ujarnya.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, saat dihubungi Rabu (26/1/2022) berpendapat, inflasi meningkat seiring kian pulihnya aktivitas masyarakat beberapa bulan terakhir. Situasi itu diyakini meningkat di 2022. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dan cukai hasil tembakau serta kenaikan harga minyak goreng dan elpiji diperkirakan berdampak pada inflasi.

Di sisi lain, produsen dan pedagang telah lama menghadapi kenaikan biaya karena gangguan pasokan. "Dengan pertimbangan itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) mesti mewaspada tekanan inflasi tahun ini," ujarnya.

BI menargetkan inflasi nasional dapat terkendali pada level 2-4 persen. Target itu sama tahun lalu. Namun, realisasi inflasi sepanjang 2021 ada di level 1,87 persen. Terkait itu, BI akan

fokus menjaga inflasi dan nilai tukar. BI juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.

Minyak goreng

Imbas kenaikan harga pangan global mulai tertransmisi di dalam negeri. Lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global turut mengerek kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Minyak goreng curah, kemasan sederhana, dan premium yang semula bisa diperoleh dengan harga Rp 9.500-Rp14.000 per liter, kini harganya berkisar Rp 18.000-Rp 20.000 per liter.

Komoditas pokok itu juga berkontribusi terhadap inflasi nasional. Pada Desember 2021, misalnya, inflasi di Indonesia mencapai 0,57 persen. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang dominan memberikan andil inflasi, yaitu sebesar 0,08 persen.

Berdasarkan Survei Pantauan Harga pada pekan ketiga Januari 2022, BI menyebutkan, perkembangan harga pada Januari 2022 tetap terkendali dan inflasi diperkirakan 0,58 persen secara bulanan. Komoditas penyumbang inflasi itu sa-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

lah satunya adalah minyak goreng, yaitu sebesar 0,03 persen.

Kementerian Perdagangan berupaya menstabilkan harga minyak goreng dengan menggelontorkan 1,5 miliar liter minyak goreng satu harga atau bersubsidi seharga Rp 14.000 per liter selama enam bulan. Minyak goreng jenis kemasan sederhana dan premium itu disediakan di toko dan gerai ritel modern serta pasar tradisional.

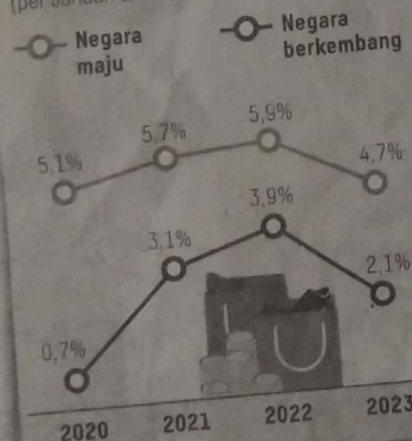
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke

Nurwan menyatakan, minyak goreng satu harga mulai disediakan di pasar tradisional. Rata-rata para pedagang pasar mendapatkan harga dari distributor Rp 13.000 per liter sehingga mereka masih untung Rp 1.000 per liter.

"Penyediaan minyak goreng satu harga di pasar tradisional akan ditambah bertahap. Berapa banyak minyak goreng yang disediakan saat ini bergantung pada pemasok karena mereka masih banyak urusan administrasi yang ribet, mulai dari produsen sampai pedagang," ujarnya. (HEN/BKY)

Proyeksi Inflasi

(per Januari 2022)



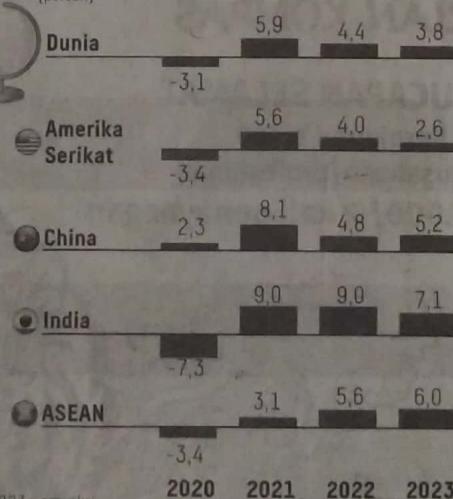
Sumber: IMF

2020, 2021 = estimasi

2022, 2023 = proyeksi

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

(persen)



INFOGRAFIK NINGSIAWATI

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Reforma Subsidi Pupuk

Bustanul Arifin

Guru Besar Universitas Lampung, Ekonom Indef, Ketua Umum Perhepi

Satu tahun lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Pertanian, Presiden Joko Widodo menyampaikan kegamangannya terkait persoalan subsidi pupuk yang tak kunjung selesai.

Presiden mempertanyakan nilai subsidi Rp 30 triliun yang tak banyak menghasilkan *return* yang signifikan. Apalagi, kasus kelangkaan pupuk subsidi masih sering dijumpai di lapangan. Presiden memerintahkan evaluasi menyeluruh kebijakan subsidi pupuk dan menemukan strategi kebijakan subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Peran pupuk pada peningkatan produksi pertanian telah diketahui secara luas. Indonesia menggunakan strategi subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Subsidi pupuk diberikan kepada industri pupuk, melalui subsidi harga gas, dan lain-lain, karena komponen harga gas cukup besar, terutama dalam produksi urea dan ZA. **K-7**

Petani menikmati subsidi pupuk itu secara tak langsung, melalui harga beli pupuk lebih murah, dibandingkan harga pasar. Akan tetapi, kelangkaan pupuk masih terjadi di beberapa sentra produksi pangan, termasuk saat musim tanam, ketika

petani membutuhkan kepastian pasokan pupuk. Kelangkaan pupuk, ketidakakuratan waktu dan dosis aplikasi pupuk telah menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas.

Petani Indonesia telah cukup paham bahwa pupuk dan pemupukan sangat penting bagi keberhasilan peningkatan produktivitas pertanian. Kondisi ini berbeda dengan periode awal Revolusi Hijau era 1980-an, ketika petani perlu diberikan bimbingan dan penyuluhan dalam penggunaan pupuk. Bahkan, petani saat ini cenderung menggunakan pupuk secara berlebihan karena harga pupuk subsidi cukup murah.

Artikel ini menganalisis kinerja perjalanan pupuk subsidi beberapa tahun terakhir dan merumuskan strategi perubahan atau reforma subsidi pupuk ke depan.

Kebutuhan vs ketersediaan

Kelangkaan pupuk subsidi terjadi karena terdapat perbedaan (*gap*) yang sangat mencolok antara kebutuhan pupuk petani yang diajukan secara elektronik melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kemampuan APBN. Pada 2021, kebutuhan pupuk subsidi mencapai 24,3 juta ton, sedangkan anggaran subsidi hanya Rp 25,3 triliun, atau hanya cukup untuk pupuk bersubsidi 9 juta ton. Artinya, ada *gap* 15,3 juta ton.

Pada 2021, alokasi pupuk subsidi 9 juta ton itu diperoleh setelah pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET)

pupuk subsidi melalui Permentan No 45/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Masyarakat tentu bertanya, mengapa fenomena *gap* yang berlangsung cukup lama ini dibiarkan berlarut-larut. *Gap* kebutuhan vs alokasi pupuk subsidi pada 2016 tercatat 12,4 juta ton atau 56,6 persen, dan meningkat terus sampai 17,3 juta ton (66 persen) pada 2020, sebelum turun menjadi 15,3 juta ton (63) persen pada 2021.

Akibatnya, kelangkaan pupuk subsidi masih terjadi, terutama pada musim tanam sampai umur tanaman dua bulan. Kelangkaan pupuk secara berulang merupakan refleksi dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang tak baik.

Pada 2022, pemerintah tak menaikkan HET dan anggaran subsidi, yaitu tetap Rp 25,3 triliun. Permentan No 41/2021 tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menjadi pedoman penting bagi pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk pada 2022.

Alokasi volume pupuk bersubsidi ditetapkan 9,11 juta ton, terdiri dari urea 4,23 juta ton, NPK 2,47 juta ton, pupuk organik 1,04 juta ton, ZA 0,82 juta ton, SP-36 0,54 juta ton, NPK khusus 0,01 juta ton, plus pupuk organik cair 1,87 juta liter.

Pemerintah membentuk Kelompok Kerja Pupuk Bersubsidi di bawah Menko Perekonomian untuk merumuskan langkah reforma kebijakan pupuk subsidi. Konsep reforma itu terdiri dari,

pertama, mengurangi atau relokasi subsidi pupuk untuk program prioritas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan lain. Kedua, secara bertahap mengubah format subsidi produksi pupuk, dari subsidi kepada industri pupuk menjadi subsidi langsung ke petani.

Kartu Tani

Reforma subsidi pupuk dilaksanakan melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK) dan penggunaan Kartu Tani, yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Petani penerima subsidi pupuk menebus pupuk di kios pengecer pupuk menggunakan Kartu Tani.

Jika ada masalah teknis di lapangan, petani masih bisa menggunakan KTP untuk menebus pupuk secara manual walaupun makan waktu lebih lama. Sistem e-RDKK telah dikembangkan sejak 2019 dan Kartu Tani dilaksanakan sejak 2020. KPK dan BPK juga merekomendasikan penerapan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



e-RDKK dan Kartu Tani dalam implementasi pupuk bersubsidi guna meningkatkan efektivitas dan mengurangi penyimpangan.

Namun, tingkat kompleksitas implementasi e-RDKK dan Kartu Tani di lapangan masih cukup tinggi. Misalnya, hanya 17,05 juta petani atau 61,37 persen dari total 27,78 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang terdapat dalam e-RDKK. Permasalahan di lapangan

adalah tak semua petani Indonesia bergabung atau jadi anggota kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Verifikasi kebutuhan dan subsidi pupuk oleh setiap individu atau rumah tangga petani amat bergantung pada kepriawaian atau kinerja petugas lapangan, umumnya penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Jika jumlah kebutuhan pupuk subsidi dalam e-RDKK ternyata sangat besar, melebihi ke-

mampuan anggaran negara, maka proses verifikasi dan validasi data lapangan tak berjalan mulus. Dinas pertanian di seluruh Indonesia seharusnya jadi salah satu verifikator lapangan sebelum usulan kebutuhan diunggah ke dalam sistem e-RDKK.

Di tingkat normatif, Kementerian Pertanian seharusnya melakukan pembinaan petani, termasuk penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam

e-RDKK. Permentan No 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Tani secara jelas mengatur ini. Secara substansi, setiap kelompok tani harus didaftarkan dalam satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan.

Aktivitas itu kemudian dicatatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Integrasi data atau inter-operabilitas data Sistem e-RDKK dengan Simluhtan seharusnya meningkatkan akurasi penyusunan kebutuhan pupuk subsidi.

Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi pennebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *electronic data capture* (EDC). Petani menebus pupuk bersubsidi dengan menggesek Kartu Tani di mesin EDC di pengecer pupuk resmi. Tiga bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terlibat dalam pelaksanaan Kartu Tani, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI.

Pada 2021, sosialisasi penggunaan Kartu Tani telah dilakukan di semua provinsi di Jawa dan beberapa di luar Jawa, yaitu NTB (khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat), Sulawesi Tengah (Kabupaten Parigi Moutong), Sumatera Utara (Kabupaten Dairi), dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Pinrang).

Lokasi proyek percontohan Kartu Tani 2021 adalah BRI fokus di empat kabupaten (Batang, Berebes, Temanggung, Sumbawa Barat); BNI fokus di lima kabupaten (Batu, Jember, Pasuruan, Probolinggo, Sumanep); dan Mandiri fokus di empat kabupaten (Ciamis, Sumedang, Bogor, Tasikmalaya).

Realisasi penggunaan Kartu

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 27/1/2022 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jomil Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Tani cukup rendah, hanya 2,56 juta unit (29 persen) dari 15,5 juta kartu tani yang tercetak atau masih jauh dari target yang dicanangkan. Kecuali BRI yang cukup tinggi, persentase Kartu Tani yang dibagikan oleh sektor perbankan kepada petani hanya 8,98 juta unit (57,9 persen).

Alasan yang mengganggu kinerja Kartu Tani adalah keterbatasan personel tenaga lapangan sektor perbankan, kualitas kerja sama dan komunikasi antara sektor perbankan dan instansi pertanian tingkat kabupaten/kota, dan sebagainya. Kendala teknis dan fisik, seperti EDC rusak atau tidak aktif, gangguan sinyal jaringan, pemahaman operasional EDC oleh kios pupuk, dan implementasi alokasi pupuk subsidi di tingkat lapangan.

Potensi distorsi, inefisiensi, dan moral hazard dari pupuk subsidi masih cukup besar, apalagi ketergantungan petani terhadap harga pupuk murah juga telanjur besar. Menurut hasil survei Panel Data Nasional (Pantanas), pada 2010 lebih dari 50 persen sampel petani padi di Indonesia telah menggunakan pupuk kimia secara berlebih.

Tingkat *overuse* pupuk kimia pada petani padi berkurang menjadi 47,1 persen pada 2016. Konsekuensi logis dari penggunaan pupuk berlebih dalam jangka panjang adalah penurunan bahan organik dalam tanah, yang bermakna berkurangnya kesuburan tanah. Pada musim kemarau, rendahnya bahan organik akan membuat tanah pertanian menjadi kering kerontang dan mudah pecah dan merekah, yang membawa konsekuensi pada menurunnya produktivitas pertanian.

Sebagian petani sebenarnya telah paham bahwa aplikasi pupuk kimia berlebihan akan berdampak buruk bagi tanah, apa-

lagi kandungan bahan organik di dalam tanah semakin menurun. Pendidikan dan penyuluhan ke petani seharusnya mulai berubah, bahwa aplikasi pupuk kimia berlebihan tidak hanya buruk bagi kesehatan tanah, tetapi juga buruk bagi relasi sosial kemasyarakatan. Sebagian petani memperoleh alokasi pupuk subsidi cukup besar, tetapi sebagian lain justru tak memperolehnya karena beberapa faktor di lapangan.

Opsi perubahan kebijakan

Reforma subsidi pupuk dapat dipercepat dengan beberapa opsi kebijakan berikut. Pertama, kejelasan tujuan subsidi pupuk. Perubahan kebijakan amat diperlukan, misalnya tujuan subsidi pupuk secara langsung adalah untuk membantu petani kecil memperoleh akses pupuk dengan harga murah. Subsidi pupuk ke depan tak dapat lagi dinyatakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan semata, tetapi untuk subsidi langsung pada petani.

Kedua, ketajaman sasaran petani kecil. Sasaran prioritas utama subsidi pupuk adalah petani kecil, khususnya di subsektor pangan. Selama ini sasaran subsidi adalah petani kecil yang memiliki lahan dua hektar atau kurang sehingga jumlah rumah tangga petani (RTP) yang memperoleh subsidi sangat besar.

Dari total 27,68 juta RTP, sebanyak 24,66 juta RTP menguasai lahan dua hektar atau kurang. Jika ambang batas subsidi diturunkan menjadi satu hektar atau kurang, maka hanya 20,76 juta RTP yang akan disubsidi. Penurunan ini mengurangi jumlah kebutuhan pupuk e-RDKK sampai 3,9 juta ton.

Ketiga, verifikasi data petani pada sistem e-RDKK. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara integrasi dengan nomor induk

kependudukan (NIK) setiap petani. Pada tingkat lebih lanjut, integrasi ini dapat dilakukan dengan data luas penguasaan lahan pada Simluhtan.

Keempat, validasi sistem e-RDKK secara otomatis. Filter validasi ini dapat menggunakan status petani (pemilik atau penguasa lahan), bukti kepemilikan atau penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan terbaru. Validasi sistem e-RDKK ini dapat dilakukan setiap tahun, sesuai dengan perubahan status dan kepemilikan lahan pada seluruh daerah di Indonesia.

Kelima, alokasi pupuk subsidi per petani di-input ke dalam Kartu Tani. Selama ini data yang di-input ke dalam Kartu Tani adalah data usulan kebutuhan pupuk sesuai informasi pada e-RDKK. Artinya, petani pemegang Kartu Tani tidak memiliki informasi yang benar dan lengkap tentang berapa jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang akan diterimanya.

Jika Kartu Tani tak diisi dengan jumlah atau volume subsidi pupuk yang akan diterima petani, potensi permasalahan sosial masih akan terbuka dan dapat menyebabkan kerawanan yang serius.

3

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 27/1/2022
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 5
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☒ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika		☐ Pojok/Karikatur

TAJUK

Efektivitas Minyak Goreng Murah

Mulai Rabu (26/1), minyak goreng satu harga mulai dijual di pasar-pasar tradisional. Penjualan minyak goreng senilai Rp 14 ribu per liter tersebut tepat sepekan setelah minyak goreng dengan kemasan yang sama dilepas di pasar ritel modern.

Pada Rabu (19/1), pemerintah memulai kebijakan minyak goreng satu harga sebagai upaya menekan kenaikan harga di pasaran. Sebelum penetapan satu harga tersebut, minyak goreng dijual pada kisaran harga Rp 19 ribu hingga Rp 21 ribu per liter.

Kenaikan harga minyak goreng dipicu melonjaknya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global. Dampaknya pada harga minyak goreng di dalam negeri yang juga ikut naik.

Meredam dampak kenaikan harga ini, pemerintah menetapkan harga minyak goreng per liter Rp 14 ribu secara nasional. Selisih harga pasar dengan harga minyak goreng 'subsidi' ini diambil dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Setelah dihitung, selisih harga keekonomian minyak goreng kemasan sederhana dan premium dengan harga eceran tertinggi (Rp 14 ribu per liter) mencapai Rp 7,6 triliun.

Selisih ini diambil dari dana BPDPKS. Dana BPDPKS berasal dari pelaku usaha perkelapasawitan nasional merujuk Pasal 93 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebut CPO Supporting Fund (CSF). Dana dihimpun dari pelaku swasta, BUMN, ataupun petani.

Dalam enam bulan ke depan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga minyak goreng pada Rp 14 ribu per liter. Untuk itu, disiapkan stok 1,5 miliar liter minyak goreng sepanjang periode enam bulan tersebut.

Harapannya, kebutuhan minyak goreng bagi rumah tangga dan usaha mikro kecil tetap terjangkau. Mereka tak terdampak kenaikan harga CPO dunia yang melambungkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Namun, kebijakan satu harga minyak goreng ini menghadapi tantangan. Sepekan terakhir, keberadaan minyak goreng yang dijual di toko-toko ritel modern cepat habis. Minyak

goreng Rp 14 ribu per liter itu secara kilat 'menghilang' dari rak-rak di supermarket.

Di antara penyebabnya, *panic buying* masyarakat. Sebagian mereka bisa jadi membeli minyak goreng murah itu dalam jumlah banyak. Aji mumpung, mumpung murah!

Namun, benarkah mereka memborong minyak goreng itu untuk keperluan rumah tangga? Apakah mereka membeli itu untuk menunjang keperluan usaha mikro kecilnya? Ataukah ada di antara pembeli itu memborong untuk ditimbun?

Atau kemudian membeli dalam jumlah banyak untuk dijual lagi, selagi di pasar tradisional masih di harga tinggi --mengingat ada jeda waktu sepekan minyak goreng murah dijual di pasar modern dan pasar tradisional?

Dan, apakah kini pedagang di pasar tradisional sudah mendapatkan pasokan minyak satu harga ini? Sejumlah pertanyaan itu mesti menemukan solusinya. Peluang penimbunan minyak goreng oleh oknum tertentu memungkinkan terjadi.

Jika belum merata persebarannya di pasar tradisional, peluang penimbun melepas minyak goreng di atas harga Rp 14 ribu per liter tetap menggiurkan. Di sejumlah daerah, minyak goreng masih dijual Rp 19 ribu sampai Rp 21 ribu per liter. Ada margin ambil untung.

Guna menutup peluang penimbun memainkan harga, pemerintah mesti gerak cepat. Tidak boleh ada satu titik pun yang belum mendapatkan pasokan. Persebarannya mesti merata di semua wilayah. Jika ini bisa dilakukan, tertutup peluang bagi penimbun.

Persoalan berikutnya, dengan mekanisme pembeli yang terbuka sebagaimana pola subsidi elpiji gas melon 3 kg, minyak goreng murah bisa dibeli siapa pun. Warga negara superkaya punya hak yang sama dengan mereka yang miskin papa.

Minyak goreng murah Rp 14 ribu per liter ini bisa dibeli oleh kelas sosial masyarakat apa pun. Tentu jika kemudian orang superkaya juga membeli minyak goreng murah, apalagi memborongnya, memunculkan kecemburuan bagi masyarakat miskin.

Mesti dipikirkan skema khusus agar distribusi minyak goreng murah ini sampai pada rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu, kebijakan satu harga minyak goreng ini haruslah efektif, adil, dan tepat sasaran pada mereka yang membutuhkan.

Bukankah esensi 'subsidi' minyak goreng murah ini untuk membantu mereka yang memang membutuhkan? ■